

MENGURAI GAGASAN TAN MALAKA DARI PERSPEKTIF KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

R. Samidi* dan Suharno

Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta-Indonesia

*Alamat korespondensi: rsamidi90@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.14710/jscl.v4i2.22658>

Diterima/Received: 2 April 2019; Direvisi/Revised: 20 Oktober 2019; Disetujui/Accepted: 8 November 2019

Abstract

This study identifies Tan Malaka's ideas in the perspective of Civic Education by exploring his great idea of Gerpolek which had published in a book with the same title. The published book supported by several other works, then analyzed in the context of Citizenship Education. Based on the results of the study shows that each of Tan Malaka's revolutionary ideas from the perspective of Citizenship Education has real contribution in the relation to build citizenship and the state, whether it seen from the context of nationalism, economics, politics, and human rights. Through Citizenship Education, it is appropriate that Tan Malaka placed in line with the national founders. His work becomes a reference in order to build the nation for the better future.

Keywords: *Tan Malaka; Thoughts; Civic Education.*

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengurai gagasan-gagasan Tan Malaka dalam perspektif kajian Pendidikan Kewarganegaraan. Jenis penulisan artikel ini menggunakan studi literatur dengan menggali setiap gagasan-gagasan Tan Malaka di dalam buku *Gerpolek* sebagai objek kajian dan didukung dengan beberapa buku karya lainnya, kemudian dianalisis dalam konteks kajian Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasar hasil kajian menunjukkan bahwa setiap gagasan revolusioner Tan Malaka ditinjau dari perspektif kajian Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kontribusi nyata dalam hubungan dengan membangun warga negara dan negara, baik itu dilihat dari konteks nasionalisme, ekonomi, politik, dan Hak Asasi Manusia. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, sepantasnya Tan Malaka didudukkan sejajar dengan para pendiri bangsa Indonesia dengan harapan setiap gagasan yang tertuang di dalam karyanya dijadikan referensi guna membangun bangsa yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Kata Kunci: Tan Malaka; Pemikiran; Pendidikan Kewarganegaraan.

PENDAHULUAN

Tan Malaka merupakan sosok pejuang bangsa Indonesia yang dikenal dengan berbagai kontroversi yang dimilikinya. Tan Malaka yang memiliki nama asli Sultan Ibrahim, lahir di Sumatera Barat pada 1897. Kehidupan Tan bisa dikatakan tidak sederhana yang dipikirkan, dengan segala persoalan mulai dari terisolasi dirinya hingga pelarian, terlalu sering dalam bayangan-bayangan penangkapan. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri Tan Malaka merupakan salah satu tokoh penggerak kemerdekaan

Indonesia yang cukup ditakuti oleh para kolonialis Belanda. Kritik dan semangat untuk merebut kemerdekaan yang tiada henti menyebabkan Tan Malaka dipenjara dan diasingkan ke luar negeri. Selama di dalam penjara, Tan Malaka banyak menghasilkan tulisan-tulisan penggugah semangat kemerdekaan dan kritik-kritik yang ditujukan pada pemerintahan Hindia-Belanda dan pemerintah Indonesia di awal kemerdekaan. Salah satu buku fenomenal terlahir dari ide dan gagasan Tan Malaka selama di dalam penjara setelah kemerdekaan adalah gerilya, politik, dan ekonomi (*Gerpolek*).

Gerpolek merupakan salah satu buku yang ditulis oleh Tan Malaka pada masa kemerdekaan pada ketika dirinya meringkuk di dalam penjara. Pada saat itu, seorang Tan hanya mengandalkan pengetahuan, ingatan, dan percakapan dengan para prajurit serta dari pembacaan buku-buku dan majalah kemiliteran yang dilakukannya lebih dari 30 tahun yang lampau. *Gerpolek* merupakan konsep perlawanan oleh Tan Malaka; menolak jalur perundingan yang dilakukan pemerintah dengan pihak kolonialis dan imperealis, dalam hal ini Belanda dan Sekutu. Seperti yang dikatakan Tan Malaka "Tuan rumah tak akan berunding dengan maling yang menjarah rumahnya". Konsep *Gerpolek* adalah siasat perang gerilya, baik politik, sektor ekonomi maupun sosial.

Pada masa sekarang sedikit dari bangsa Indonesia mengenal nama Tan Malaka. Di mata pelajaran Sejarah atau di buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tidak tampak sepak terjang ketokohan Tan Malaka dalam upaya bela negara. Sangat kontras jika dilihat dari buku Sejarah ataupun PPKn di sekolah, eksistensi dari beberapa tokoh nasional seperti Soekarno-Hatta, Sutan Sjahrir, Dr. Soepomo, Yamin. Tan Malaka seolah-olah orang asing bagi bangsanya sendiri, bahkan dianggap sebagai pemberontak negara. Padahal, jika secara objektif dilihat dari kacamata sejarah, Tan Malaka sebagai salah satu pejuang revolusi dengan gagasan-gagasan revolusionernya selama 10 tahun dengan tekad yang kuat berupaya untuk merealisasikan gagasannya bersama rakyat Indonesia (Nasir, 2007: viii). Gagasan-gagasan yang dituangkan sebagai bentuk kontribusi dan alat perlawanan untuk tujuan perubahan Indonesia merdeka (Prabowo, 2002: x)

Penulis dalam hal ini mencoba membedah beberapa gagasan Tan Malaka yang merupakan salah satu putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Melalui buku *Gerpolek* ini dan ditambah dengan beberapa referensi dari karyanya yang lain, penulis mencoba mengelaborasi dari gagasan Tan Malaka dari beberapa dimensi dan melihat dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai sumber dari beberapa buku dan jurnal ilmiah dalam mengurai gagasan-

gagasan Tan Malaka dilihat dari perspektif kajian Pendidikan Kewarga-negaraan.

MENAKAR NASIONALISME TAN MALAKA

Berbicara mengenai nasionalisme Tan Malaka, tulisan ini tidak akan cukup mendeskripsikan secara terperinci kontribusi untuk didedikasikan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tulisan ini hanya memberikan gambaran umum mengenai nasionalisme Tan Malaka dalam perjuangannya mempertahankan kemerdekaan. Untuk menakar seberapa besar perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, terlebih dahulu perlu diketahui teori-teori dasar mengenai konsep nasionalisme.

Dingley (2008: 45) menyatakan terminologi nasionalisme dimaknai sebagai sebuah ideologi yang dibentuk oleh manusia dengan wujud organisasi politik (negara) dan memiliki kedaulatan berdasar persetujuan dan kekhasan budaya. Begitu pula hal yang sama diungkapkan oleh Gellner (1998) bahwa nasionalisme memiliki makna sebagai bentuk komunitas yang memiliki budaya yang sama. Gellner lebih melihat bahwa konsep nasionalisme sebagai kesimpulan logis sebagai panggung untuk sejarah umat manusia yang didominasi oleh masyarakat industri (Santiago, 2012: 8). Sementara itu Smith (2010: 37) salah satu tokoh penyumbang terbesar mengenai teori-teori nasionalisme dengan memandang nasionalisme sebagai ideologi, budaya, dan agama dari suatu bangsa. Ide munculnya nasionalisme dalam karena adanya persamaan budaya, tempat tinggal yang sama, kebiasaan-kebiasaan, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat, serta sejarah panjang dari suatu bangsa tersebut (Mikail, 2014: 88). Greenfeld dalam hal ini memandang konsep dasar nasionalisme sebagai solusi guna menghilangkan penderitaan manusia yang disebabkan oleh adanya ketidakadilan, penolakan, dan penghinaan (Santiago, 2012: 1). Dalam konteks nasional, nasionalisme menuntut adanya sebuah sikap yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara Indonesia, ikut memperjuangkan kepentingan negara dan menempatkan masyarakat Indonesia dalam sebuah persatuan diatas kebhinekaan demi

terwujudnya negara Indonesia yang utuh (Darmadi, 2017: 143).

Dari beberapa teori nasionalisme di atas, bahwa ketokohan seorang Tan Malaka dalam pergerakan kemerdekaan nasional tidak bisa dipandang sebelah mata, walaupun dalam catatan sejarah Tan Malaka terbilang salah seorang kontroversial dengan berbagai pemikirannya yang memunculkan banyak tafsiran yang menghasilkan pro dan kontra. Bahwa, ia mendapat stigma negative dari kebanyakan masyarakat Indonesia yang menganggap dirinya tidak layak dijadikan pahlawan nasional karena sebagai salah seorang tokoh aliran kiri dan sempat bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Komunis Internasional (Komintern). Akan tetapi pengabdian Tan Malaka untuk bangsa Indonesia tidak bisa di tepikan mengingat banyak jasa yang disematkan baik dalam bentuk gagasan pemikiran maupun dalam aplikatifnya di dunia pendidikan dan politik.

Terdapat beberapa referensi yang berusaha menggali peran Tan Malaka selama pergerakan kemerdekaan Indonesia. Awal kiprah Tan Malaka dalam cita-cita dan harapannya disebarkan pada bangsa Indonesia melalui pendidikan. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Belanda pada 1919, Tan Malaka mengabdikan menjadi guru di sekolah anak-anak kuli kontrak perkebunan di Tanjung Morowa dengan mengajarkan baca tulis dan bahasa melayu (Syarifudin, 2012: 58-59). Selama enam tahun mengajar di kontrak perkebunan, Tan menyaksikan dan merasakan secara langsung realitas sosial yang tragis dan memilukan yang mendatangkan rasa empati serta menyulut semangat perlawanannya atas praktik kolonialisme Belanda. Semangat mengubah nasib bangsanya sangatlah kuat, sehingga ia mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai seorang guru dan berhijrah ke Pulau Jawa. Selama di Jawa. Ia bergabung dengan beberapa organisasi, bermula perkenalannya dengan H.O.S Tjokroaminoto, Darsono, dan Semaun. Perkenalan ini semakin membuka pintu gerbang bagi Tan Malaka untuk melakukan perlawanan atas praktik kolonialisme Belanda. Kartodirjo (1975: 262) mengisahkan, bahwa semenjak perkenalannya dengan Semaun di Semarang, Tan Malaka difasilitasi untuk mendirikan sekolah

rakyat yang diberi nama Sekolah Sarekat Islam (SI), yang kemudian dikenal dengan sekolah Tan Malaka yang kemudian berkembang bukan hanya di pulau Jawa, tetapi di luar Pulau Jawa seperti Ternate.

Karir politik Tan Malaka, berawal dari tahun 1921 dengan menjabat sebagai ketua PKI, kemudian mendirikan Partai Republik Indonesia (PARI), dan pada 1946, mendirikan Partai Murba (Sayifudin, 2012: 61-62). Tujuan utama Tan Malaka bergelut di bidang politik semata-mata untuk mencari celah dalam melakukan revolusi dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan dari kolonialis Belanda (Fuji, 2017: 42).

Dalam perjuangannya merebut kemerdekaan, Tan Malaka menggunakan konsep revolusi. Konsep revolusinya terilhami dari pemikiran Marx dan Lenin. Revolusi menurut Tan Malaka (2008: 79) lahir atas perubahan sosial ketika terjadi pertentangan kelas yang disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, dan psikologis. Semakin kuat penindasan, maka akan semakin memunculkan reaksi dari masyarakat yang tertindas untuk melakukan perlawanan. Perbedaan revolusi Tan Malaka dengan Marx, yakni Tan Malaka berharap bahwa revolusi sejatinya akan melahirkan tatanan masyarakat baru yang lebih beradab dan negara menghargai nilai kemanusiaan dan hak politik warga negara.

Cukup banyak kontribusi yang diberikan oleh Tan Malaka untuk Republik Indonesia. Ia merupakan salah satu pejuang militan, revolusioner, dan melahirkan pemikiran-pemikiran yang bersifat membangun untuk masa depan negara. Separuh hidup Tan Malaka diabdikan untuk mengkritik dan melakukan perlawanan pada pemerintah kolonial Belanda.

Gagasan Ekonomi Kerakyatan

Dalam konteks ekonomi, Tan Malaka membuat sebuah *frame* dalam gagasannya untuk terlepas dari sisa atau kembalinya kapitalisme Belanda, yakni dengan membuat konsep ekonomi berjuang dan muslihat. Konsep ekonomi berjuang menurut Tan dalam *Gerpolek*-nya (2010: 83) menyatakan, bahwa secara keseluruhan masyarakat Indonesia harus memiliki andil besar dalam melakukan pelemahan terhadap kapitalisme Belanda dengan cara merencanakan produksi sebagai bentuk

penghasilan, distribusi dengan menyalurkan ke masyarakat, dan pertukaran dagang. Artinya, bangsa Indonesia setidaknya 60% memiliki alat produksi sendiri, distribusi, ekspor, dan impor. Dengan secara detail Tan Malaka dalam rencana ekonomi berjuang yang diusung mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pembagian hasil dan gaji untuk diatur secara tertata dan terencana yang justru bertolak belakang dengan dunia kapitalisme yang tidak mengatur pembagian gaji dan pembagian hasil (Malaka, 2005: 84)

Tan Malaka dengan tulisannya mengkritik gaya ekonomi kapitalis Belanda yang sangat merugikan bangsa Indonesia, sampai-sampai Tan Malaka mengibaratkan kapitalisme sebagai sebuah gedung dan negara-negara di dunia sebagai tiangnya, maka Indonesia merupakan salah satu dari tiang tersebut (Malaka, 1987: 5). Lenin memberikan gambaran dalam kajian ekonomi makro bahwa kekuatan kapital akan melahirkan imperialisme dalam ekonomi dengan melihat beberapa sisi: 1) peran konsentrasi ekonomi yang dominan; 2) dominasi keuangan sebagai modal; 3) adanya ekspor modal; 4) adanya stratifikasi dari dominasi perusahaan; 5) stratifikasi dalam dimensi politik (Fuchs, 2010: 34-37). Hal ini didukung oleh tesisnya Hilferding yang mengatakan imperialisme merupakan bagian dari kapitalisme keuangan (Sutton, 2013: 223). Ketika kapitalisme keuangan berkembang, maka kemunculan imperialisme semakin kuat.

Sementara kapitalisme dalam pemikiran Tan Malaka merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Marx, yakni teori "nilai-lebih" atau yang disebut dengan teori *meerwaarde* (Syarifudin, 2012: 113). Di dalam buku *Das Kapital*, Karl Marx (2004: 205) memberikan definisi mengenai teori nilai lebih yaitu penetapan kembali nilai harga sebagai suatu jumlah yang nilai produknya melebihi nilai unsur pembentukannya. Maksudnya, bahwa nilai yang dihasilkan oleh pekerja dalam jangka waktu dengan kreativitas yang berbeda akan melahirkan tingkat surplus yang berbeda. Semakin tinggi nilai produksi pekerja maka tingkat surplus semakin tinggi, begitupun sebaliknya semakin rendah nilai produksi yang dihasilkan pekerja, maka tingkat surplusnya semakin rendah, sehingga ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial

dalam kehidupan para pekerja, yang berakibat pada lahirnya kelas-kelas sosial dan secara otomatis munculnya hegemoni dalam kelas tertentu. Hal ini menjadi kritik keras dari kaum marxian, seperti apa yang diungkapkan oleh Gramsci dengan melihat kepentingan pemilik modal dengan para pekerja, bahwa hegemoni secara dominan lahir dalam perusahaan dan pabrik (Patria & Arief, 2009: 131) karena di dalamnya terjadi eksploitasi besar-besaran yang menyebabkan timbulnya penindasan terhadap kaum buruh/pekerja demi kepentingan dan keuntungan besar pemilik modal. Hal ini dibuktikan dengan beberapa arsip yang diungkapkan oleh Roger Knight bahwa sekitar tahun 1890-an para pemilik modal kapitalis Belanda di Jawa dalam menjalankan roda produksi barang di pabrik, merekrut tenaga kerja lokal dengan mempekerjakan banyak perempuan dan anak-anak dengan gaji yang sangat murah sebagai alternatif menekan biaya produksi (Gervase, 2014: 438).

Hal yang wajar jika Tan Malaka mengkritisi kapitalisme di Indonesia karena Belanda sebagai negara kolonial benar-benar ingin menguasai kekayaan bangsa Indonesia dengan membangun pabrik-pabrik di tempat yang strategis, menem-patkan alat-alat produksi modern, dan mempekerjakan secara paksa kaum buruh Indonesia dengan sistem upah yang tidak jelas. Para pemilik modal lokal tidak berdaya dengan kekuatan kapital asing yang berakibat pada ketidakteraturan kemajuan ekonomi sebagaimana mestinya. Di desa-desa menghasilkan karet, teh, dan barang pengrajin lainnya, tetapi hanya mengenyangkan dan memperkaya saudagar asing, dan kemiskinan tetap merajalela. Kota-kota bukanlah menjadi pusat ekonomi bangsa Indonesia, malah terus-menerus menjadi sumber ekonomi yang mengalirkan keuntungan para pemodal asing (Malaka: 2008: 42).

Oleh karenanya, Tan Malaka dalam hal ini memiliki ide untuk menggerakkan ekonomi sosialis sebagai bagian dari rencana untuk perjuangannya melawan kapitalisme. Konsep dari ekonomi sosialis memiliki dasar tujuan yang mulia yakni kebersamaan, sama rata, dan tolong menolong (Malaka, 2005: 104). Terminologi dari ekonomi sosialis dari gagasan Tan Malaka secara ideologis menerapkan ekonomi yang teratur,

dimana tingkat produksi diimbangi dengan konsumsi, bukan dalam bentuk anarkis seperti kapitalis (Syaifudin: 2012: 114).

Bentuk nyata dari kekuatan ekonomi sosialis terpampang nyata dalam *Gerpolek* pada bab 13 yakni koperasi (Malaka, 2010: 86). Lebih lanjut Tan Malaka menjadikan Koperasi sebagai senjata dalam perang ekonomi melawan kapitalis Belanda. Masyarakat Indonesia harus bisa menggerakkan koperasi secara masif di mana saja sebagai pengisi perekonomian dan pembantu politik gerilya. Secara garis besar konsep koperasi yang didengungkan Tan Malaka memiliki arti yakni membuka peluang masyarakat untuk mendapatkan harga semurah-murahnya bagi anggotanya dengan untung dibuat dengan sekecil-kecilnya guna berbagai kepentingan umum saat itu, seperti kepentingan perang gerilya. Hal ini sebagai bentuk atas perlawanan dari perang dagang kapitalis Belanda yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Tan Malaka (2010: 87) membagi koperasi menjadi lima bagian yaitu: 1) koperasi produksi; 2) koperasi distribusi; 3) koperasi pengangkutan; 4) koperasi kredit; dan 5) koperasi pasar. Kelima koperasi ini diharapkan bisa diterapkan oleh masyarakat sebagai bentuk atau ciri khas dari sistem ekonomi Indonesia.

Tan Malaka (2010: 11) dalam *Gerpolek*-nya mencatat pada awal kemerdekaan Indonesia, semua kebun yang menghasilkan kina, sisal, getah, kopi, tambang seperti, tambang arang, timah, minyak, emas, perak, dan bauxit, yang ditinggalkan dari sisa Belanda berada di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia. Semenjak penetapan keputusan perjanjian Lingarjati dan Renville, semua hak milik asing dikembalikan.

Untuk itu Tan Malaka menggarisbawahi bahwa untuk bisa memenangkan perang ekonomi melawan kapitalis Belanda, terlebih dahulu masyarakat Indonesia harus bisa memenangkan kekuasaan politik seutuhnya, karena politik bagi Tan Malaka merupakan pintu pertama dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dan kemerdekaan. Merebut kekuasaan politik, maka secara tidak langsung meruntuhkan hegemoni ekonomi yang dilakukan oleh imperialis kepada bangsa Indonesia.

Malaka (2008: 120) memiliki rancangan dalam bidang ekonomi yang dirasa sangat cocok diterapkan oleh bangsa Indonesia di awal

kemerdekaan, yang dikenal dengan Program Proletar Indonesia, di antara: 1) pabrik-pabrik menjadi milik nasional, seperti tambang batu bara, minyak, dan emas; 2) hutan-hutan, kebun-kebun seperti kebun karet, gula, teh, kopi, kina dikuasai oleh pemerintah Indonesia; 3) alat transportasi dan lalu lintas dikelola oleh pemerintah; 4) bank-bank, maskapai-maskapai besar menjadi milik nasional; 5) mendirikan industri-industri baru dengan bantuan negara seperti pabrik tenun, mesin dan perkapalan; 6) mendirikan koperasi-koperasi rakyat dengan memberikan pinjaman yang murah oleh negara; 7) memberikan perkakas dan ternak kepada kaum petani untuk memperbaiki lahan pertaniannya dan mendirikan kebun percobaan negeri; 8) melakukan transmigrasi besar-besaran dengan dibiayai oleh negara dari tanah Jawa ke tanah seberang; 9) membagi-bagikan tanah yang kosong kepada petani yang tidak memiliki tanah dengan memberikan bantuan dana untuk proses penggarapan tanah; 10) menghapus sisa-sisa feodal dan tanah partikelir dan membagikannya pada petani yang miskin.

Melihat dari Kacamata Politik

Tan Malaka dengan gagasan-gagasan briliannya tidak hanya dilihat dalam ruang lingkup ekonomi, tetapi terdapat beberapa dari hasil pemikiran Tan dalam konteks politik sebagai bentuk perjuangannya melawan kolonialis Belanda. Awal karier politik seorang Tan Malaka bermula sekitar tahun 1921 berawal dari keterlibatannya di belakang layar pada pemogokan buruh perkebunan Belanda (Poeze, 2008: xvi). Kondisi yang membuat terdesak menyebabkan Tan kembali ke Jawa. Sekitar tahun 1921, Tan menjabat sebagai ketua Partai Komunis Indonesia (PKI) menggantikan Semaun yang pergi ke Moskow untuk studi. Pengasingan dari beberapa penggagas lahirnya komunis seperti Semaun, Munawar, dan Musso sebagai pioner meletakkan dasar tradisi akademik Indonesia ke Uni Soviet (Hill, 2014:622). Akan tetapi, seiring waktu berjalan, pemikiran Tan terbentur dengan beberapa kepentingan politik anggota PKI lainnya, dan pada puncaknya pada 1926-1927 ditandai meletusnya pemberontakan Jawa Barat dan di Sumatera Barat. Akibat peristiwa tersebut,

Tan Malaka melepaskan jabatannya dari ketua PKI. Kemudian mendirikan beberapa partai politik seperti Partai Republik Indonesia (PARI) pada 1927.

Pada periode 1946-1948, Tan mengkritik keras langkah politik yang diterapkan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. *Gerpolek* menceritakan pada bab-bab awal betapa seorang Tan Malaka menolak politik diplomasi pemerintah Indonesia dengan Belanda yang notabene sangat merugikan kedaulatan bangsa Indonesia. Tan Malaka mengkritik hasil perjanjian Linggarjati dan Renville yang condong menguntungkan Belanda. Tan Malaka selaku pihak oposisi sangat menyayangkan keputusan Sjahrir pada 27 Maret 1946 yang menyatakan bahwa: 1) supaya pemerintah Belanda mengakui Republik Indonesia secara *de facto* atas Jawa dan Sumatera, 2) supaya Belanda dan Republik Indonesia bekerja sama membentuk Republik Serikat, 3) Republik Indonesia Serikat bersama-sama dengan Belanda, Suriname, Cuacau, menjadi peserta dalam suatu ikatan kenegaraan Belanda (Pranarka, 1985: 70). Keputusan yang dihasilkan dalam perjanjian Linggarjati menjadi polemik dan menjadi senjata oposisi untuk menggulingkan kabinet Sjahrir. Poeze (2008: 275) menceritakan bahwa oposisi lebih memilih politik bambu runcing sebagai pedoman dalam berjuang dan itu merupakan kehendak rakyat dan pemuda demi cita-cita mereka merdeka 100%. Dalam situasi ini, Sjahrir tidak bisa berbuat lain kecuali mengajukan permintaan untuk mengundurkan diri dan Soekarno menerimanya dan untuk sementara waktu presiden mengambil alih semua kekuasaan pemerintahan (Poeze, 2010: 13).

Tan Malaka (2010: 9-10) mencatat di musim perjuangan Indonesia pada awal kemerdekaan, kekuasaan terbentang 700.000 mil persegi, kurang lebih 4,5 juta mil persegi berada di dalam kekuasaan Republik Indonesia. Sementara hasil dari perundingan Linggarjati, hanya Jawa dan Sumatera menjadi kekuasaan Republik Indonesia yang luasnya hanya 210 ribu persegi, atau 30% dari seluruh kekuasaan Indonesia. Keputusan diplomasi Linggarjati sangat merugikan bangsa Indonesia.

Setelah jatuh kabinet Sjahrir, pada 3 Juli Amir Sjaifudin berhasil membentuk kabinet

baru. Kemudian melanjutkan perundingan dengan Belanda dalam rangka mendapat pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh dunia internasional (Pranarka, 1985: 72). Hasil dari Perjanjian Renville bahkan lebih menyudutkan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Dari hasil perundingan tersebut menyebabkan wilayah Indonesia semakin dipersempit dan tendensi munculnya negara serikat terbuka lebar. Tan Malaka (2010: 10) mencatat bahwa hasil dari diplomasi Renville mengakibatkan enam atau tujuh daerah Jawa terbagi dan beberapa di daerah Sumatera serta dua persen tanah dan laut Indonesia di klaim Belanda.

Dengan kata lain, Tan Malaka memberikan kesimpulan sebagaimana tertuang di dalam *Gerpolek*-nya bahwa diplomasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui perundingan-perundingan berakibat pada kebangkrutan, karena strategi yang digunakan tidak konsisten dan matang. Pulau demi pulau dikuasai kembali oleh kolonial Belanda. Pemerintah terkesan bersifat lunak menempuh politik “menyerah sebelum berperang” dan menerima negar-negara boneka Belanda, sehingga nama pemerintah di mata masyarakat Indonesia tercoreng dengan menjual kedaulatannya. Kekacauan di dalam negeri merupakan akibat dari ketidakjujuran pemerintah yang berakibat pada menurunnya kepercayaan publik dan tekat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Untuk itu Tan Malaka beserta semua organisasi perjuangan dan partai bersatu ke dalam satu organisasi revolusioner guna memerangi kolonialisme Belanda dengan program yang jelas. Tan Malaka berhasil menghimpun 141 organisasi politik, laskar, dan partai politik di Purwokerto, Jawa Tengah pada 1946 yang dikenal dengan *Persatoean Perjoengan* (Poeze, 2010: 39). Satu organisasi yang terstruktur dengan baik menempuh tujuh butir sebagai pedoman dalam haluan politiknya, di antaranya: 1) Indonesia merupakan negara kesatuan yang merdeka sejak 17 Agustus 1945 dan berdasar atas Undang-Undang Dasar yang sudah ditetapkan. Konsekuensi dari ketetapan itu, maka semua kekuasaan asing harus angkat kaki dari wilayah kesatuan Republik Indonesia. Setelah itu barulah perundingan dengan Belanda bisa dilakukan atas

dasar kesetaraan; 2) kedudukan dan kedaulatan Republik Indonesia harus dipertahankan dan wilayah yang sudah dikuasai Belanda harus dikuasai kembali; 3) elemen masyarakat yang menentang kedaulatan Republik Indonesia harus disingkirkan; 4) struktur kekuasaan didasarkan pada Demokrasi Berjoeng dari seluruh rakyat yang ikut berjuang. Organisasi orientasinya mulai dari bawah ke atas sebagai bentuk perwujudan pemerintahan rakyat, tentara rakyat dengan munculnya harapan akan kemenangan dan menyingkirkan para pengkhianat bangsa; 5) rasionalisasi dimana semua sumber kehidupan demi kepentingan perang dan kemerdekaan; 6) memperluas perwakilan-perwakilan dan hubungan dengan luar negeri; 7) kompensasi dari rakyat untuk kerugian di pihak musuh melalui penyitaan terhadap harta milik musuh (Poeze, 2010: 40-41).

Semangat Tan Malaka yang menggelora untuk mendirikan organisasi *Persatoean Perjoengan* dimaksudkan untuk mendukung Indonesia merdeka 100 persen, sehingga menarik banyak pengikut akibat dari simpati masyarakat (Poeze, 2009: 499). Organisasi ini menjadi pijakan pertama guna mewujudkan revolusi nasional melawan kolonialisme dan imperialisme internasional sebagai bagian dari revolusi internasional.

Gagasan Strategi Perang

Gagasan Tan Malaka mengenai strategi perang, secara terperinci termuat di dalam buku *Gerpolek*. Gagasan Tan Malaka tentang strategi perang, sangat menarik karena seperti diketahui bahwa Tan merupakan masyarakat sipil bukan dari kalangan militer. Di bab awal, Tan Malaka (2010:18-20) menyinggung tentang jenis perang dengan membagi menjadi dua bentuk perang. *Pertama*, jenis perang yang dibuat oleh negara dengan memiliki tujuan untuk menaklukkan dan menindas negara lain dengan tujuan perluasan kekuasaan. Perang penindasan ini disebut juga dengan perang imperialisme. Perang ini memiliki ciri-ciri yaitu, a) merebut kekayaan alam baik itu bahan-bahan baku untuk pabrik, bahan makanan, b) semua kekayaan alam negara yang ditaklukkan dibawa ke negeri yang menang, c) negara jajahan dijadikan sebagai alat untuk menanamkan modal

baik itu dalam bentuk pabrik, tambang, perdagangan, dan alat transportasi. *Kedua*, jenis perang yang dilakukan oleh suatu negara untuk mempertahankan diri dan membebaskan bangsanya dari pemeerasan dan penindasan. Peran ini disebut dengan perang kemerdekaan, dimana negara jajahan melawan negara penjajah guna melepaskan diri dari penindasan dan ketidakadilan.

Terkait kasus di Indonesia dalam konteks perlawanan sebelum dan sesudah proklamasi 17 Agustus, dikategorikan termasuk perang dalam rangka mempertahankan diri dan merebut kemerdekaan (Malaka, 2010: 22). Belanda yang notabene sebagai penjajah berusaha menghalangi bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Alasan yang pertama, kekayaan Indonesia yang sangat melimpah, kemudian Belanda mendirikan pabrik, kereta api, perkapalan, dan bank dengan modal yang sangat besar, maka akan sulit bagi Belanda menyerahkan kedaulatan dan kekuasaannya kepada bangsa Indonesia karena berakibat akan membahayakan harta benda dan bangsanya. Kolonialisme yang diterapkan di Indonesia sifatnya merusak sebagaimana Adam Smith di dalam teorinya mengatakan bahwa koloni pada dasarnya bersifat merugikan dengan mengurus seluruh sumber daya dari negara-negara jajahan sehingga tercipta monopoli di seluruh aspek kehidupan masyarakat jajahan (Williams, 2014: 285). Bagi penjajah, kolonialisme merupakan cara tradisional sebagai jalan keluar terciptanya surplus populasi dan dibentuknya pemukiman baru sebagai akibat dari perluasan wilayah (jajahan) dengan melihat kondisi iklim yang kondusif (Balockkaite, 2013: 152-153).

Untuk itu, Tan Malaka memberikan solusi untuk dapat meraih kemerdekaan dari tangan imperialis Belanda yakni dengan melakukan revolusi dengan merebut kemerdekaan 100%. Tan Malaka menghendaki melalui gagasannya untuk melakukan perang terbuka, bukan dengan cara diplomasi, karena dengan melakukan diplomasi, kemungkinan besar akan membuka celah bagi imperialis Belanda untuk mempertahankan tanah jajahannya, dan terbukti dengan hasil diplomasi melalui perjanjian Linggarjati dan Renville yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Oostindie (2017: 268)

menuturkan bahwa masuknya pasukan tentara Belanda merupakan bentuk dekolonisasi setelah kemerdekaan Indonesia. Belanda mulai masuk kembali di Indonesia pada 10 Desember 1946 - 5 Maret 1947 dan beroperasi di Sulawesi, agresi militer Belanda I pada 21 Juli - 5 Agustus 1947 dan puncaknya terjadi perang gerilya di Yogyakarta pada 1948-1949.

Tan Malaka perlunya jiwa sang gerilya ditanamkan pada diri setiap bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan dan menyita hak-hak milik musuh. Tan Malaka dalam *Gerpolek*-nya memberikan rambu-rambu atau strategi dalam berperang guna mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Ia merinci bahwa kaidah-kaidah dalam melakukan peperangan sebagai bentuk strategi, di antaranya: 1) melakukan defensif tatkala terdesak dan melakukan offensif tatkala ada peluang; 2) melihat keadaan medan pertempuran; 3) melihat logistik persenjataan, 4) jumlah prajurit; dan 5) pengaturan tempo dalam peperangan (Malaka, 2010: 37-44). Siasat ini sangat membantu bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan dalam merebut kemerdekaan.

Analisis Gagasan Tan Malaka dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan banyak berbicara mengenai hubungan warga negara dengan warga negara dan hubungan warga negara dengan negara. Kesemuanya ini dipelajari dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh karenanya sangat dibutuhkan pemahaman komprehensif dan holistik dasar Pendidikan Kewarganegaraan yang sesungguhnya.

Terdapat beberapa ahli dan pegiat Pendidikan Kewarganegaraan dalam memberikan sumbangsih mengenai terminologi dari Pendidikan Kewarganegaraan, di antaranya adalah Branson. Branson (1999: 4) mendefinisikan Pendidikan Kewarganegaraan dalam demokrasi ialah sebagai pengikat untuk memperkuat dan mengembangkan otonomi pemerintahan dengan maksud agar warga negara ikut berperan serta dalam pemerintahan guna menciptakan pemerintahan yang demokratis. Pendidikan Kewarganegaraan dapat juga dikatakan sebagai sebuah program pendidikan yang mengkaji tentang konsep kebangsaan, Hak

Asasi Manusia, demokrasi, masyarakat kewargaan (civil society) serta Pendidikan Kewarganegaraan dalam hubungannya dengan negara (Hamidi dan Lutfi, 2010: 78).

Dasar utama Pendidikan Kewarganegaraan menyangkut hak dan kewajiban warga negara dan negara. Hamidi dan Lutfi (2010: 73) menyatakan bahwa kerangka utama Pendidikan Kewarganegaraan dapat dianalisis dengan menggunakan dua kajian. *Pertama*, yakni kajian kronologis dengan melihat muatan kajian yang berkaitan dengan konsep dasar hak dan kewajiban, timbulnya hak dan kewajiban, pelaksanaan, dan hambatan-hambatan yang timbul dari pelaksanaan hak dan kewajiban. *Kedua*, kajian dalam bidang kehidupan yang meliputi kedudukan hak dan kewajiban warga negara dalam lingkup kehidupan berideologi, berpolitik, bidang ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan dan keamanan. Sementara itu, terkait konten daripada Pendidikan Kewarganegaraan, diantaranya, mengenai hak dan tanggung jawab, sejarah konstitusi, lembaga-lembaga negara, hak asasi manusia, sistem hukum, hak-hak politik, ekonomi, dan sosial, identitas nasional, partisipasi warga negara, dan demokrasi.

Adapun dalam hal ini Pearce dan Hallgarten (2007: 7) mendefinisikan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ditinjau dari skala sempit dan luas. Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti sempit bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang mampu menangani dalam hak pilih dan dari setiap pertarungan politik yang demokratis, sedangkan dalam arti luas tujuannya yaitu untuk menciptakan warga yang berbagi dalam usaha sosial bersama. Konsep dalam arti sempit dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di sini yaitu pendidikan yang dirancang untuk menghasilkan warga negara yang terpelajar. Dalam *learning outcome*-nya diharapkan siswa memiliki karakter jujur, benar, adil, terpercaya, serta memiliki kesadaran untuk mengabdikan kepada negara (Clough and Holden, 2002: 2). Pendidikan Kewarganegaraan dalam lingkup sekolah sangat diperlukan untuk membentuk warga negara yang mengenal jati diri dan negaranya. Tujuan secara luas dari Pendidikan Kewarganegaraan yaitu untuk menghasilkan warga negara yang aktif dengan komitmen terhadap nilai dan praktik kepada masyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan mengenai pandangan ini tidak hanya mencakup melek politik, tetapi juga diharapkan tercipta masyarakat yang bermoral dan bertanggung jawab sosial dalam keterlibatan di dunia sosial (Halstead and Pike, 2006: 34). Oleh karenanya, Pendidikan Kewarganegaraan dikonstruksikan dalam mata pelajaran yang di dalamnya diajarkan nilai-nilai yang bersifat universal, memiliki kecakapan dalam bernegara guna mewujudkan warga negara yang berpartisipasi aktif dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Samsuri, 2011: 28).

Jika mengacu pada ruang lingkup kajian Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana yang dikemukakan oleh Murray Print, tidak terlalu jauh dengan ruang lingkup kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa kajian Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia jika mengacu pada teorinya Kerr (1999: 16) bersifat minimal yang ruang lingkungannya berkisar dalam tataran persekolahan. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia jika mengacu pada Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi memuat aspek-aspek seperti: a) nasionalisme, seperti cinta tanah air, keutuhan negara, bela negara, dan cinta lingkungan; b) norma, hukum, dan peraturan, c) hak asasi manusia seperti perlindungan HAM, pengaturan hak dan kewajiban, persamaan kedudukan, kemerdekaan mengeluarkan pendapat; d) konstitusi negara; e) kekuasaan dan politik; g) Pancasila; h) globalisasi. Sementara itu, di dalam standar Kurikulum 2013 dengan mengacu pada Permendigbud No. 64 Tahun 2013 dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan mengacu pada empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari ruang lingkup kajian Pendidikan Kewarganegaraan tersebut, jika dikaitkan dengan beberapa gagasan dari Tan Malaka yang dituangkan dalam *Gerpolek* dan ditambah dengan beberapa karyanya dapat dianalisis dalam Tabel 1.

Hasil analisis dari beberapa ide Tan Malaka tersebut ditinjau dari poin-poin kajian Pendidikan Kewarganegaraan, maka dalam

konteks berwarganegara seorang Tan sudah sepantasnya menjadi salah satu putra terbaik yang dimiliki Bangsa Indonesia dan keputusan Presiden Soekarno mengangkat Tan Malaka sebagai pahlawan nasional sangat tepat. Gagasan-gagasan brilian yang dituangkan dalam karyanya, sudah mencakup ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan. Membangun warga negara dan negara sebagaimana yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan, sudah tercermin dari setiap jejak kehidupan dan dari setiap gagasan revolusionernya sebagai bentuk tekad dalam memperjuangkan hak-hak kemerdekaan bangsa Indonesia

Tabel 1. Identifikasi Analisis Pemikiran Tan Malaka dalam Mata Pelajaran PKn

No.	Ruang Lingkup PKn	Gagasan Tan Malaka
1	Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Nasionalisme)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerukan gerakan perang gerilya guna memukul mundur kolonial Belanda 2. Menyerukan kemerdekaan 100% 3. Menolak terbentuknya Republik Indonesia Serikat 4. Melawan kolonialisme dan kapitalisme Hindia-Belanda.
2	Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendirikan sekolah rakyat di Semarang yang dikenal dengan Sekolah Tan Malaka, diperuntukkan bagi putra bangsa Indonesia 2. Menentang imperialisme Belanda yang menginjak harkat dan martabat bangsa Indonesia 3. Melawan perbudakan 4. Mengkritik hak kepemilikan pabrik dan alat-alat produksi di tanah Republik Indonesia 5. Memperjuangkan hak politik dan ekonomi.
3	Kekuasaan, Politik, dan Ekonomi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendirikan organisasi kepartaian dengan mendirikan Partai Republik Indonesia (PARI) dan Partai MURBA 2. Menentang gaya politik diplomasi dalam perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville yang merugikan bangsa Indonesia 3. Gagasan ekonomi kerakyatan dalam bentuk koperasi.
4	Konstitusi dan bentuk negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjuangan mempertahankan UUD 1945 sebagai konstitusi negara 2. Gagasan bentuk negara perwakilan rakyat atau soviet.

Sumber: Hasil Analisis Penulis

Namun demikian, menjadi sebuah paradoks bagi generasi bangsa Indonesia sekarang, nama besar Tan Malaka seolah menjadi nama yang asing. Hal ini terjadi karena semenjak pemerintahan Orde Baru, terdapat itikad kurang baik dengan mencoba menghapuskan peranan Tan Malaka dan kontribusinya dalam membangun bangsa dan negara. Ini dapat dibuktikan seperti yang diutarakan oleh Fuji (2017: 5) bahwa semenjak pemerintahan Orde Baru, nama Tan Malaka dihapuskan dalam mata pelajaran sejarah yang diajarkan di sekolah. Menurut kacamata Orde Baru, Tan Malaka merupakan tokoh partai yang dituduh beberapa kali melakukan pemberontakan. Padahal dalam

kenyataannya pada 1927, justru Tan Malaka menolak pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Oleh karena itu, sejatinya sebagai penerus bangsa Indonesia, jasa-jasa para pendahulu yang berjuang dengan kesukarelaan demi terbebasnya bangsa dari jeratan kolonialisme dan imperialisme. Gagasan-gagasan dari pendahulu bangsa perlu dijadikan sebagai referensi untuk kemajuan dan keutuhan Negara Republik Indonesia pada masa depan.

SIMPULAN

Tan Malaka dengan gagasan-gagasan revolusionernya serta kegigihan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan sangatlah patut untuk dijadikan rujukan oleh setiap bangsa Indonesia. *Gerpolek* sebagai salah satu karya dari Tan Malaka, memuat beberapa gagasan dalam lingkup ekonomi, politik, dan strategi perang sebagai solusi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam lingkup ekonomi, secara jelas Tan Malaka terang-terangan melawan kapitalis Hindia-Belanda. Kritiknya terhadap kapitalisme Hindia-Belanda sangat berdasar karena sangat merugikan bangsa Indonesia yang di dalamnya terdapat praktik penindasan, perbudakan, dan yang tidak kalah penting adalah eksploitasi besar-besaran semua kekayaan rakyat Indonesia. Untuk itu Tan memiliki tawaran kepada bangsa untuk menerapkan sistem ekonomi kerakyatan yang berbentuk koperasi. Dibidang sosial-politik, Tan Malaka mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin memiliki strategi-strategi politik untuk mencari solusi tepat setiap permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara. Strategi Tan Malaka tidak menghendaki adanya diplomasi terhadap negara penjajah. Dalam meraih kemerdekaan 100%, dibutuhkan revolusi sebagai solusi untuk melepaskan ikatan-ikatan imperialis Belanda. Dalam bidang militer, Tan menuangkan gagasannya mengenai strategi-strategi dalam berperang. Ilmu kemiliteran sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia guna untuk menempuh kemerdekaan secara utuh.

Kaitannya dengan Pendidikan kewarganegaraan, setiap generasi bangsa Indonesia di Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas diwajibkan mempelajari

mata pelajaran tersebut. Di dalam runag lingkup Pendidikan Kewarganegaraan, setidaknya gagasan-gagasan Tan Malaka sudah menyentuh dari setiap cakupan materi tersebut dengan melihat dari konteks Hak Asasi Manusia, nasionalisme, bentuk negara, dan politik dan ekonomi. Dalam kehidupan bernegara, Tan Malaka sebagai bangsa Indonesia sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik (*good citizen*), walaupun dari beberapa rekam jejak Tan Malaka yang kontroversial, tetapi setidaknya ia sudah berusaha memberikan sekuat tenaga, jiwa dan pikirannya untuk ikut serta berkontribusi demi kebaikan bangsa dan negara. Untuk itu perlu kiranya di dalam kurikulum mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memuat gagasan brilian dari para pendahulu negara sebagai pembanding dari beberapa gagasan teoretikus Barat.

REFERENSI

- Balockaite, R. (2013). "Book Review. Imperialism, by J.A. Hobson". *Journal capital and class*, Vol. 37 (1): 152-153.
- Clough, N & Holden, C. (2002). *Education for Citizenship: Ideas into Action*. London: Routledge Taylor & Prancis Group.
- Darmadi, H. (2017). *Eksistensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Pemersatu Bangsa*. Bandung: Alfabeta.
- Dingley, J. (2008). *Nationalism, Social Theory, Social Theory, and Durkheim*. New York. Palgrave Macmillan.
- Fuchs, C. (2010). "New Imperialism: information and imperialism?" *Global Media Communication*, Vol. 6(1): 33-59.
- Fuji, N. (2017). *Tan Malaka: putra bangsa yang terlupakan*. Yogyakarta: Sociality
- Gervase, W. (2014). "Book Review. Commodities and Colonialism: The Story of big sugar in Indonesia, 1880-1942 by Roger Knight". *Colonial South East Asia Research*, Vol. 22 (3): 437-440.
- Halstead, M. J., et al. (2006). *Citizenship and Moral Education: Values and Action*. New York: Routledge Taylor & Prancis Group
- Hamidi, J. & Lutfi, M. (2010). *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi*

- Hukumnya*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Hill, D. T. (2014). "Indonesia Political Exiles in the USSR". *Critical Asian Studies*, Vol. 46 (4): 621-648.
- Kartodirjo, S. (1975). *Sejarah Nasional Indonesia, jilid IV*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Malaka, Tan (1987). *Naar de Republiek Indonesia: Menuju Republik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Massa.
- Malaka, Tan (2005). *Merdeka 100%: Tiga Percakapan Ekonomi Politik*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Malaka, Tan (2008). *Aksi Massa*. Yogyakarta: Narasi.
- Malaka, Tan (2010). *Gerpolek: Gerilya, Politik, dan Ekonomi*. Yogyakarta: Narasi
- Marx, K. (2004). *Das Kapital: Kritik der Politischen Oekonomie, Vol. 1, Cet 1*. a. b Oea Hay Djoen. Jakarta: Hasta Mitra.
- Mikail. E. H. (2014). "Nationalism concept and Turkish Nationalism". *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 5 (12): 87-90.
- Nasir, Z. (2007). *Tan Malaka dan Gerakan Kiri Minangkabau*. Yogyakarta: Ombak
- Oostindie, G. (2017). "The Decolonization War in Indonesia, 1945-1949: War Crimes in Dutch Veteran Egodocuments". *War in History*, Vol. 25 (2): 254-276.
- Patria, N & Arief, A. (2009). *Antoni Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pearce, N. & Hallgarten, J. (2007). *Introduction Tommorrow Citizens: Critical Debates in Citizenship and Education*. London: Instute for Public Policy Reaseach.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untu Sekolah Dasar dan Menengah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Poeze, H. A. (2010). *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 3 Maret 1947-Agustus 1948*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Poeze, H.A. (2008). *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 1 Agustus 1945-Maret 1946*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Poeze, H.A. (2009). "The Cold War in Indonesia 1948". *Journal of southeast asian studies*, 40 (3): 497-517.
- Prabowo, H. (2002). *Perspektif Marxisme, Tan Malaka: Teori dan Praksis Menuju Republik*. Yogyakarta: Jendela.
- Pranarka (1985). *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
- Samsuri (2011). *Pendidikan Karakter Warganegara: Kritik Pembangunan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia.
- Santiago, J. (2012). Secularisation and Nationalism: A Critical Review. *Social Compass*, Vol. 59 (1): 1-20.
- Smith, A. D. (2010). *Nationalism: Theory, Ideology, and History*. Cambridge: Polity Press.
- Sutton, A. (2013). "Towards an Open Marxist Theory of Imperialism". *Capita & class*, Vol. 37 (2): 217-237.
- Syaifudin. (2012). *Tan Malaka: Merajut Masyarakat dan Pendidikan Indonesia yang Sosialis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Williams, D. (2014). "Adam Smith and Colonialism". *Journal of International Political Theory*, Vol. 10 (3): 283-301.